

KORAN
DIGITAL

radar.

MEDIA

T E R D E P A N

EDISI KAMIS
19 OKT 2023



NANANG AVIANTO RESMI JABAT KAPOLDA KALTIM GANTIKAN IMAM SUGIANTO, SEGERA TERBANG KE KALTIM



Lewat PKB, Dinkes Kaltim Tingkatkan
Kualitas Kesehatan Dasar di Wilayah 3T



Irjen Pol Nanang Avianto (kanan) resmi menjabat sebagai Kapolda Kaltim menggantikan Irjen Pol Imam Sugianto (kiri)

NANANG AVIANTO RESMI JABAT KAPOLDA KALTIM GANTIKAN IMAM SUGIANTO, SEGERA TERBANG KE KALTIM

JAKARTA - Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si, resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Kapolda Kaltim) menggantikan Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si.

Serah terima jabatan (Sertijab) berlangsung di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jakarta, Rabu (18/10).

Dalam keterangannya kepada wartawan, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengatakan Kapolda Kaltim yang baru segera terbang ke Kaltim untuk memulai tugasnya.

Menurut Yusuf, sesuai dengan rangkaian sertijab di Mabes Polri, Kapolda akan melaksanakan serangkaian kegiatan sertijab di

Markas Kepolisian Daerah Kaltim bersama Kapolda Kaltim yang lama, Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si.

Kegiatan sertijab Kapolda Kaltim akan meliputi sejumlah acara di Mapolda Kaltim. Salah satunya adalah penyambutan kedatangan Kapolda Kaltim di Bandara SAMS Balikpapan, yang akan diikuti oleh acara penyambutan resmi di Markas Polda Kaltim.

"Selain itu, akan ada upacara farewell dan serah terima Pataka Polda Kaltim, serta sertijab Ketua PD Bhayangkari Kaltim. Acara ini juga akan mencakup serah terima Ibu Asuh Polwan dan pelepasan Kapolda Kaltim yang lama, Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si," jelas Yusuf. **(MK)**



Nikko Dwi Angga, Pustakawan Ahli Muda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

DPKD Kaltim Terus Berinovasi Kembangkan Program TP-BIS

SAMARINDA - Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TP-BIS) merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.

Program TP-BIS termasuk ke dalam program prioritas nasional yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perpustakaan, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan untuk memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan literasi masyarakat akan semakin meningkat yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nikko Dwi Angga, Pustakawan Ahli Muda, Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mengungkapkan bahwa pelaksanaan program TP-BIS ini adalah salah satu upaya perwujudan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Ini adalah amanat tujuan berbangsa dan bernegara, termaklud dalam pembukaan UUD, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa," tutur Nikko

Menurut Nikko, perpustakaan tidak lagi hanya sekadar menjadi tempat menyimpan buku, tetapi harus menjadi agen perubahan, dengan cara menghadirkan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat.

Di Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan TP-BIS menjangkau 18 perpustakaan. Untuk saat ini di

Berau sudah melaksanakan program TP-BIS secara mandiri.

"TP-BIS di Kaltim masih 18 perpustakaan, tetapi masih banyak desa dan kelurahan yang belum dijangkau karena beberapa faktor," ungkap Nikko

Untuk kedepannya, DPKD Kaltim mencanangkan proyek TP-BIS dengan target 5 desa agar bisa direplikasi secara mandiri oleh kabupaten/kota, dan dibutuhkan sinergisitas antar stakeholder di daerah agar program ini dapat terimplementasi dengan baik.

"Kalau menjangkau semua kelurahan & desa, kami terbatas dana. Jadi nanti akan direncanakan untuk 5 desa sebagai proyek autopilot. Tetapi butuh kolaborasi semua pihak. Semoga bisa teralisasi," pungkasnya. **(dsy/adv/DPKD)**

Pewarta : Desy Alvionita
Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
KEPALA BPSDM KALTIM



dr. H. Jaya Muslimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinkes Kaltim Dr Ronny Setyowati. (Istimewa)

TAK PERLU ANTRE LAGI, PROGRAM LAYANAN PENGANTARAN OBAT MUDAHKAN MASYARAKAT

SAMARINDA- Agar tak ada lagi budaya mengantre obat terlalu lama, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur tengah menjalankan layanan pengantaran obat di beberapa rumah sakit.

Diketahui, ada beberapa rumah sakit di Kaltim telah menjalankan program layanan pengantran obat pada pasien hingga ke rumah. Inovasi layanan ini digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pasien rawat jalan.

Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinkes Kaltim Dr Ronny Setyowati mengatakan, kini masyarakat lebih mudah mengakses layanan medis. Ada beberapa rumah sakit di Kaltim telah meluncurkan sistem pendaftaran online yang inovatif.

Salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Syahrani yang sudah menerapkan.

"Adanya layanan ini juga sangat memudahkan dan memberikan keringanan bagi pasien yang tidak bisa berlama-lama antre obat," ungkap Dr Ronny, Rabu (18/10/2023).

Dengan adanya program tersebut, masyarakat juga tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mengantre obat di rumah sakit.

"Sekarang sistemnya sudah berubah. Sudah ada layanan antar obat ke rumah dengan pembiayaan ongkos kirim," tutupnya. **(ADV)**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN<http://dinkes.kaltimprov.go.id>Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIMDr. Akmal Malik, M.Si
W. GUBERNUR KALTIMdr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr Jaya Mualimin. (Istimewa)

Lewat PKB, Dinkes Kaltim Tingkatkan Kualitas Kesehatan Dasar di Wilayah 3T

SAMARINDA - Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin mengatakan Dinkes tengah berupaya dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T)

"Salah satu upaya yang kami lakukan adalah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) sesuai dengan standar. Kami targetkan hingga tahun 2024, ada 150 PKB yang dilakukan di seluruh Kaltim," ungkap Jaya, Rabu (18/10/2023).

Pelayanan kesehatan bergerak merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Dalam pelayanan bergerak juga melibatkan tenaga kesehatan profesional dan peralatan medis yang mumpuni.

"Melalui pelayanan kesehatan bergerak, kami ingin memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dan merata kepada masyarakat, guna meningkatkan kesadaran

masyarakat pentingnya hidup sehat dan pencegahan penyakit," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong kabupaten/kota di Kaltim untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan 100 persen intervensi keluarga.

"Kami berharap hingga tahun 2024 seluruh kabupaten/kota di Kaltim sudah melakukan PIS-PK dengan 100 persen intervensi keluarga," imbuhnya.

Jaya juga menambahkan, Dinkes Kaltim juga terus memperkuat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar.

Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur adalah rasio rujukan non spesialisistik yang kurang dari dua persen.

"Rasio rujukan non spesialisistik ini menggambarkan seberapa baik FKTP dapat menangani kasus-kasus terkait kesehatan yang tidak memerlukan spesialisasi," tutup Jaya. **(ADV)**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



Analisis Gizi Dinkes Kaltim Uzah Maria Ulfah. (Istimewa)

PENCEGAHAN STUNTING HARUS DIMULAI SEJAK DINI

SAMARINDA- Analisis Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) Uzah Maria Ulfah menuturkan pencegahan terhadap stunting atau gagal tumbuh dilakukan sejak calon ibu masih pada fase pra nikah dan masa remaja.

"Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya akibat dari kurangnya gizi dalam jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau pada masa pertumbuhan anak," jelas Uzah, Rabu (18/10/2023).

Uzah juga mengatakan, Dinas Kesehatan telah menyediakan tablet penambah darah sebagai pencegahan anemia dan stunting yang didistribusikan ke Puskesmas dan sekolah melalui unit kesehatan sekolah (UKS).

Untuk tablet penambah darah diberikan secara gratis.

Ia mengemukakan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin di posyandu atau Puskesmas guna mendeteksi dini

kondisi ibu dan janin.

"Di Puskesmas ada USG untuk mengecek kondisi janin, apakah ada masalah atau tidak. Ada juga alat antropometri untuk mengukur tinggi dan berat badan ibu secara digital," ujarnya.

Lebih lanjut, edukasi dari orang tua kepada anak sejak dini harus dibiasakan makan yang sehat. Orang tua harus memberikan contoh dan mengawasi asupan nutrisi anak.

"Jangan biarkan anak terpapar asap rokok atau makan bersama keluarga yang merokok," imbuhnya.

Terlepas itu, stunting adalah masalah yang melibatkan banyak sektor, tidak hanya kesehatan, tetapi juga pendidikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Semua pihak harus bersama-sama mencegah dan menangani stunting. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas," pungkasnya. **(adv)**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



6.707 ARSIP INAKTIF EKS BIRO KEUANGAN PROVINSI KALTIM DIMUSNAHKAN DPKD KALTIM

SAMARINDA - Usai dimusnahkan secara simbolis pada 3 Oktober 2023 lalu, 6.707 arsip inaktif milik eks Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (17/10/2023), berhasil dimusnahkan dengan metode pencacahan menggunakan mesin oleh Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur.

Pemusnahan arsip-arsip tersebut berlangsung di Depo Arsip DPK Kaltim Jalan Bung Tomo No.130, Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang. Proses pemusnahan dilakukan secara bergantian oleh para arsiparis.

Arsiparis DPKD Kaltim, Andreas Kelan mengungkapkan proses pemusnahan telah berlangsung sejak seminggu silam dan akan terus berlanjut hingga seluruh arsip telah tercacah.

"BPKAD telah menyerahkan seluruh arsip dan ini merupakan tindak lanjut dari upaya penyelamatan dokumen dengan melalui proses pemusnahan. Pemusnahan ini pun juga tidak bisa sembarang dilakukan. Harus melalui beberapa kali pengecekan oleh

DPKD Kaltim dan ANRI hingga dinyatakan boleh untuk dimusnahkan," jelas Andreas saat ditemui di ruangannya, Selasa (17/10/2023).

Arsip-arsip yang telah menjadi potongan-potongan kertas tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Pemusnahan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinas Lingkungan Hidup" tutupnya.

Diketahui, arsip-arsip yang berusia lebih dari 15 tahun tersebut terdiri dari berbagai dokumen, seperti buku hingga lembaran kertas.

Sebelumnya proses serah terima dan pemusnahan telah dilakukan secara simbolis oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur serta turut dihadiri langsung oleh Tato Purjianto selaku Arsiparis Alih Media, Ketua Tim Akuisisi Kementerian Lembaga Perpindahan Ibukota Negara dan Asisten Gubernur Bidang Administrasi Umum, Riza Indra Riadi di Lantai 5 Gedung BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda.

(ADV/Han/DPKD)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



869 PEMANCIING SEMARAKKAN SIFT DI HUT KE-24 KUTIM

SANGATTA - Sangatta International Fishing Tournament (SIFT) turut memeriahkan rangkaian HUT ke-24 Kabupaten Kutim. Acara ini resmi dimulai setelah Bupati Ardiansyah Sulaiman membuka kegiatan tersebut di Lapangan Helipad Kantor Bupati Kutim, Selasa (12/10/2023) malam.

Menariknya, ada peserta dari warga negara asing yang ikut bertanding yakni peserta yang berasal dari Inggris, Australia, Taiwan, Singapura, dan Malaysia.

Acara ini juga nampak dihadiri Ketua DPRD Kutim Joni Kapolres AKBP Roni Bonic, Dandim Letkol Inf Adi Swastika, Danlanal Sangatta Letkol Laut (P) Shodikin, Kadis PU M Muhiir, Kadispar Nurullah, Plt Kepala Disperindag Kutim Nurhadi Putra, Wakil Direktur Panitia dari Polda Sultra Aipda Doni Patrick dan undangan lainnya.

Saat membuka, Bupati Ardiansyah Sulaiman berharap turnamen ini berjalan lancar dan tak

ada kendala apapun. Terdapat dua kategori yang dilombakan, kategori internasional dan tradisional.

"Alhamdulillah dua kategori ini diikuti oleh pemancing-pemancing yang andal dari Kutim, Kaltim dan luar negeri," ucapnya.

Ardiansyah mengatakan di balik ajang ini, ia ingin mengenalkan potensi yang dimiliki Kutim secara keseluruhan. Karena Kutim ini memiliki semua sumber daya. Di antaranya punya laut dan pantai, di darat punya juga ada emas hitam, perkebunan dan potensi lainnya.

"Menjelang penutupan, para peserta bakal diajak meninjau peternakan madu kelulut yang dimiliki Kutim di Sangatta Selatan yang dibina Pertamina. Juga disambut dengan UMKM yang ada," kata Ardiansyah.

Terakhir, ia mengucapkan selamat datang kepada semua peserta yang bakal berlomba. Mulai dari pemancing tradisional sampai

pemancing dari luar negeri.

Sementara itu, Ketua Panitia Basrie melaporkan lomba memancing selain memfasilitasi masyarakat yang memiliki hobi memancing, sekaligus mempromosikan hasil laut dan objek wisata yang ada di Kutim.

"Turnamen berlangsung selama 4 hari dari tanggal 17 - 20 Oktober 2023. Diikuti peserta sebanyak 72 tim yang terdiri 464 orang dan satu tim berisi 5 pemancing. Ada pemancing dari luar negeri yang berasal dari Inggris, Australia, Taiwan, Singapura, dan Malaysia," ujar Basrie yang juga menjabat Kadispota Kutim.

Ada pula kategori pemancing tradisional yang diikuti 109 tim terdiri 869 orang dan satu tim sebanyak 4 pemancing. Sedangkan hadiah yang disediakan sebesar Rp 600 juta dan jackpots 1 unit mobil. (RKT)

Pewarta : Irfan Aditama
Editor : Nicha Ratnasari



Acara dibuka Sekretaris Jenderal Kemendagri, Dr. Suhajar Diantoro, pada Senin (17/10).

BPSDM KALTIM SIAPKAN FASILITATOR ORIENTASI DPRD

JAKARTA - Untuk mengantisipasi terpilihnya anggota DPRD periode 2024-2029, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, mengukuhkan tujuh Widyaiswara untuk mengikuti Pelatihan Training of Trainers (Pelatihan untuk Pelatih) Orientasi DPRD.

Pelatihan diikuti empat orang Widyaiswara Ahli Utama, yakni Muchlis Syachrani, Bere Ali, Sugeng Chairuddin, dan tiga orang Widyaiswara Ahli Madya, yakni Zuhriah, Ery Arifullah, dan Hernawaty.

Pelatihan yang dilaksanakan BPSDM Kementerian Dalam Negeri berlangsung di Hotel Golden Boutique, Jakarta, mulai 16 hingga 20 Oktober 2023.

Dari Kaltim, mereka bergabung dalam angkatan pertama bersama Provinsi Aceh, Jawa

Barat, Sulawesi Selatan, Kalbar, NTB, dan Provinsi Banten, serta perwakilan dari Universitas Gajayana, Malang.

Jauhar Efendi, salah satu peserta ToT Orientasi DPRD, saat dihubungi awak media, menjelaskan bahwa materi pelatihan cukup banyak, termasuk tentang Sistem Pemerintahan Indonesia, Penguatan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Tata Tertib, dan Kode Etik DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Materi yang tidak kalah pentingnya adalah tentang Fungsi, Tugas, dan Wewenang serta Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Hak dan Kewajiban Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota," pungkas Jauhar. **(MJE/ADV)**



PERSIAPAN GROUNDBREAKING BANDARA WVIP, PJ GUBERNUR AKMAL MALIK TINJAU PPU DAN IKN



**HETIFAH FASILITASI DESA WONOSARI JADI
DESA WISATA DI IKN LEWAT PELATIHAN
DAN PENDAMPINGAN**



PERSIAPAN GROUNDBREAKING BANDARA VVIP, PJ GUBERNUR AKMAL MALIK TINJAU PPU DAN IKN

PPU - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Dr. Akmal Malik, melakukan kunjungan kerja ke wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (18/10/2023).

Kunjungan ini merupakan langkah penting dalam persiapan kedatangan Presiden dalam rangka groundbreaking pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN yang akan segera dilaksanakan.

Kunjungan Pj Gubernur dimulai dengan tiba di Jembatan Pulau Balang, di mana dia disambut Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Pj Bupati PPU Makmur Marbun, dan Forkopimda PPU, serta didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra M Syirajudin serta beberapa perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim.

Setelah berdiskusi singkat di Jembatan Pulau Balang, rombongan melanjutkan perjalanan

ke Kecamatan Penajam untuk meninjau lokasi pembangunan Bandara VVIP IKN.

"Hari ini kita melakukan konsolidasi di lapangan dalam rangka melihat persiapan rencana kedatangan Bapak Presiden, dalam rangka groundbreaking pembangunan bandara VVIP IKN yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Saya bersama Pangdam, Danrem, Pj Bupati PPU dan Forkopimda PPU, tadi kami melihat persiapan sudah sangat bagus," ungkap Pj Gubernur Akmal Malik kepada awak media.

Selain itu, Pj Gubernur Akmal Malik juga menegaskan komitmen Pemprov bersama Pemkab PPU untuk mendukung pembangunan IKN di Bumi Kaltim.

"Kami tentunya sebagai staf Bapak Presiden di lapangan, mendukung setiap langkah-langkah teman-teman kontraktor pelaksana bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan ber-

jalan dengan baik. Untuk itu kami turun di lapangan ini. Kita cek sekaligus mengantisipasi setiap potensi-potensi permasalahan yang terjadi," sebutnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini pun berharap agar pembangunan infrastruktur pendukung di sekitar wilayah IKN berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah dijadwalkan. "Kita tadi melihat progres pembangunan jalan menuju Jembatan Pulau Balang. Ada tol juga tadi on progress. Kita melihat betapa keseriusan pemerintah mempersiapkan dukungan terhadap IKN. Kita berharap langkah-langkah yang dilakukan sampai sejauh ini berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah disiapkan selama ini. Kita berharap persiapan-persiapan ini betul-betul bisa menjadikan nanti sesuai dengan tepat waktu," beber Akmal Malik. (MK)



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat mengunjungi destinasi Goa Batu Tapak Raja, Selasa (17/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

HETIFAH FASILITASI DESA WONOSARI JADI DESA WISATA DI IKN LEWAT PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN

PPU - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian terus mendorong kemajuan industri pariwisata di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Kali ini, dia mengajak Politeknik Pariwisata Makassar ke Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

Para akademisi itu diminta untuk memberikan bimbingan dan pelatihan serta pendampingan ke pelaku pariwisata di desa ini untuk meningkatkan kompetensinya. Dari kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat menjadi "pemain utama" dalam pindahannya pusat negara ke Kaltim.

"Bimtek merupakan media untuk bersinergi, membuat rencana bersama, dan action plan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada warga Kaltim saat ini sangat penting, khususnya yang berada di sekitar IKN. Agar jangan hanya jadi penonton," ujarnya, Selasa (17/10/2023).

Penguatan kapasitas ini secara khusus mengangkat tema "Ekonomi Tumbuh dan Bangkit Melalui Kebangkitan Desa Wisata yang Terkelola dengan Baik". Dimaksudkan agar nantinya IKN dapat menyerap tenaga kerja dan buka kesempatan usaha bagi warga lokal.

Menurut Hetifah, IKN merupakan peluang besar yang dapat memicu perkembangan di wilayah PPU. Di sisi lainnya, pembangunan di PPU juga harus memiliki berdampak positif bagi masyarakat.

"Jangan sampai hadirnya IKN menjadikan warga tidak sejahtera, sebab hal ini memprihatinkan. Terus terang saya sangat sedih kalau IKN ada, tapi banyak warga PPU yang menganggur. Jangan sampai itu terjadi," sebut dia.

Adapun peserta pelatihan kali ini diikuti oleh 60 peserta, berasal dari kalangan kelompok sadar wisata (pokdarwis), karang taruna, Bumdes, BPD, aparatur desa, PKK dan pelaku usaha homestay. Paparan materi disampaikan oleh tim Poltekpar, Muhammad Arifin dan Nursalam dan Ketua Asosiasi Desa Wisata se-Indonesia (Asidewi), Andi Yuwono.

Lebih lanjut, Hetifah menegaskan karena adanya IKN, Kaltim kini telah menjadi sorotan dunia. Sehingga kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk dapat bersaing sebagai masyarakat lokal yang unggul sangat besar.

Pilihan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam penilaiannya merupakan hal yang tepat. Terlebih, Desa Wonosari memiliki destinasi Goa Batu Tapak Raja yang saat ini sedang berkembang dan memiliki prospek yang sangat baik ke depan.

"Bimtek ini diharapkan menjadi kegiatan berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa hadirnya IKN tidak membuat warga Wonosari menjadi penonton dan berujung tidak sejahtera," pungkas Hetifah.

Pewarta : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari



JADI DAYA TARIK BARU, PROYEK WATERBOOM PULAU KUMALA DITARGET RAMPUNG AKHIR TAHUN



**Bupati Minta Penanganan Inflasi di
Kukar Berjalan dengan Konsisten**



Pulau Kumala yang terletak di tengah Sungai Mahakam. (Istimewa)

JADI DAYA TARIK BARU, PROYEK WATERBOOM PULAU KUMALA DITARGET RAMPUNG AKHIR TAHUN

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus melakukan pembenahan Pulau Kumala. Memastikan tempat wisata yang pernah berjaya pada masanya ini, kembali menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kukar.

Salah satunya dengan memperbaiki wahana yang ada, sekaligus membangun wahana baru Waterboom. Dengan total anggaran yang dikucurkan senilai Rp 8 miliar. Bahkan progres wahana yang berada tepat di tengah-tengah Pulau Kumala ini, hingga saat ini sudah mencapai 30-40 persen.

"Alhamdulillah saat ini pengerjaan Waterboom terus berproses. Untuk seluncurannya masih dalam proses pengiriman," ungkap Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, Rabu (18/10/2023).

Fasilitas penunjangnya pun kini juga terus

dikebut pengerjaannya. Seperti lampu dan beberapa kelengkapan lainnya. Karena memang Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar ditargetkan untuk membuka wahana baru tersebut tahun 2023 ini.

"Kita targetnya tahun ini rampung, dengan harapan tentunya langsung bisa dibuka untuk umum," jelas Rendi.

Ketika pengerjaannya rampung, Rendi memastikan akan melanjutkan pengembangan wahana penunjang Waterboom pada 2024 mendatang. Yakni dengan membangun wahana kolam gelombang, menjadi wahana yang melengkapi keberadaan Waterboom.

"Pengembangan akan tetap dilakukan, di mana kolam gelombang bakal ditambah di tahun depan," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari

Bupati Minta Penanganan Inflasi di Kukar Berjalan dengan Konsisten

TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, meminta jajarannya konsisten dalam menekan laju inflasi di daerah. Keinginan ini dilontarkan langsung oleh Edi, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi. Dalam upaya Pengendalian Harga dan Ketersediaan Pangan di Kukar.

Apa yang diinginkan bupati ini bukan tanpa dasar, berdasarkan sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar mencatat, penanganan kemiskinan di Kukar telah melebihi target yang ditetapkan.

Bahkan, belum lama ini Kukar menerima dana insentif fiskal sebesar Rp 9,8 Miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagai apresiasi lantaran Kukar dianggap berhasil menekan laju inflasi di daerah.

"Bagaimana untuk meningkatkan dan mempertahankannya, kita harus konsisten melakukan penanganan inflasi," ujar Edi.

Untuk mewujudkannya, orang nomor satu di Kukar itu berkeyakinan, semua perangkat daerah bisa melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan di tengah masyarakat. Pengendalian inflasi yang telah dilakukan pun sudah menyentuh substansinya. Menurut Edi setelah rapat koordinasi selesai, harus ada forum kecil yang membedah variabel bantuan kepada kelompok yang diberdayakan dan harus selalu dicek.

"Sudah ada kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam situasi tertentu. Ini supaya stakeholder dan lembaga satu arah kerjanya, sehingga persoalan besar dipecahkan dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Edi, pengendalian inflasi erat kaitannya dengan kondisi pangan, fenomena alam dan perang. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, khususnya Pemkab Kukar pun harus cepat tanggap mengantisipasi masalah ini.



Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Istimewa)

Kebijakan yang dilakukan secara nasional juga dipercaya akan memberikan pengaruh bagi bangsa dan negara. Kalau tidak dilakukan dengan baik, kata Edi, tentu akan membawa dampak bagi masyarakat.

"Apa yang sudah kita capai tolong detailkan pada hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk mendorong pemberdayaan. Jangan sampai ada operasi pasar masyarakat yang memerlukan tapi kita tidak bisa datang," ucapnya.

Kepada camat, lurah dan kepala desa, Bupati Edi pun menekankan agar bisa melihat situasi dengan baik. Ini untuk memastikan agar tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan hak yang semestinya diberikan.

Tujuan lainnya ialah, agar program pengendalian inflasi di Kukar menjadi salah satu kegiatan pangan murah yang benar-benar sampai ke masyarakat den-

gan baik dan berbasis data.

"Kontrol dan awasi dengan baik bahan pangan yang akan dipasarkan disetiap kecamatan, jangan sampai lewat waktu hingga bahan pangan tersebut tidak bisa dikonsumsi. Monitoring ini dengan baik dan pastikan kualitas barang memang layak didistribusikan," pintanya.

Ia berharap, pelaksanaan kegiatan pangan murah tepat sasaran terhadap sejumlah titik yang telah ditetapkan. Ini diperlukan agar bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan atau menengah ke bawah.

"Kita optimis ini bisa berjalan dengan baik agar pengendalian inflasi di daerah bisa dikendalikan. Tentu semua harus ada kerjasama antara stakeholder dan OPD terkait harus konsisten sesuai dengan target yang ingin dicapai," tutupnya. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Asisten I Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat (Istimewa)

Pemkab Kukar Ajak Warga Dukung Polisi Amankan Pemilu 2024

TENGGARONG - Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Akhmad Taufik Hidayat, turut mengajak masyarakat Kukar untuk mendukung kinerja kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Taufik mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan tersebut. Baginya momentum ini dapat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pengamanan, ketertiban dan peningkatan sinergitas seluruh stakeholder dalam mendukung dan mensukseskan Pemilu 2024 mendatang.

"Kita akan menjalin sinergi dengan Polres, TNI, dan juga pengamanan dari masyarakat. Itu semua demi kelancaran seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024 di Kutai Kartanegara," kata Taufik.

Sebagaimana diketahui, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, Polres Kukar menggelar Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024. Kegiatan ini guna memastikan keamanan selama proses pemilihan berlangsung.

Apel gelar pasukan yang diikuti oleh aparat keamanan ini menandai dimulainya operasi keamanan yang akan berlangsung selama 222 hari. Hingga 20 Oktober 2024 mendatang.

Kapolres Kukar, AKBP Hari Rosena, saat memimpin apel gelar pasukan menjelaskan tujuan kegiatan dilaksanakannya Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024.

Hal tersebut dalam rangka peningkatan

sinergitas dan kolaborasi TNI-POLRI, seluruh stakeholder, LSM dan tokoh masyarakat agar tetap menjaga kekompakan dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kukar.

"Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel yang sudah hadir pada pelaksanaan apel. Kegiatan ini sebagai upaya kita bersama menjaga dan mengantisipasi gangguan kamtibmas dan kerawanan di wilayah Kukar menjelang Pemilu 2024," terangnya.

Hari Rosena mengungkapkan, Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024 merupakan upaya kepolisian dalam memberikan atensi pelaksanaan pengamanan bagi para personel yang melaksanakan tugas.

Hal ini perlu dilaksanakan agar personel lebih waspada lagi dan tidak ada anggota yang ikut-ikutan dengan kegiatan yang berbau politik karena Polri harus netral.

"Dalam setiap pengamanan, wajib kedepankan upaya humanis hindari sikap arogan. Sebagai anggota Polri kita tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sehingga kita harus netral tidak ada yang ikut-ikutan kegiatan politik," tandasnya.

Selain menggelar apel, kegiatan Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024 sekaligus dirangkai dengan pengecekan pasukan dan penyematan tanda penghargaan oleh Kapolres Kukar. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Sekkab Kukar, Sunggono. (Ady/Radar Kukar)

Sunggono Paparkan 6 Strategi Pengendalian Inflasi di Kukar

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), belum lama ini menerima apresiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berupa dana insentif fiskal sebesar Rp 9,8 miliar, atas keberhasilan Kukar menekan laju inflasi di daerah.

Kunci keberhasilan Pemkab Kukar dalam menekan laju inflasi pun diungkap oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dalam upaya pengendalian harga dan ketersediaan pangan di Kukar, yang juga dihadiri Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Ia mengatakan, Kukar sudah menetapkan roadmap pengendalian inflasi daerah dari tahun 2022 – 2024. Peta tersebut menggambarkan rencana kegiatan mengenai cara pemerintah daerah mengendalikan kebijakan inflasi di Kukar.

"Memang Kukar telah menerima insentif fiskal yang dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pengendalian dan penanganan inflasi," ujar Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kutai Kartanegara itu.

Sunggono membeberkan, ada 6 upaya konkret yang telah

dilakukan Pemkab Kukar dalam penanganan inflasi. Di antaranya, melaksanakan operasi pasar murah kerjasama Disperindag dengan Perum Bulog cabang Samarinda.

Ini sudah terlaksana di 52 titik lokasi, dengan data kegiatan operasi pasar pada bulan September 2023 total kuantum terjual 84,093 kg komoditi beras, minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu.

Kedua, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Ketiga, melakukan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Keempat melaksanakan gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga dan subsidi ongkos angkut yang bersumber dari APBD.

"Pengendalian inflasi ini, selain telah dilakukan oleh TPID diharapkan juga dilakukan secara bersama-sama dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa," harapnya.

Sunggono mengatakan, Kukar memang telah ditetapkan sebagai wilayah yang rawan pangan. Namun, status ini ditetapkan bukan karena kekurangan pangan, melainkan karena kurangnya tenaga

kesehatan di Kukar.

Oleh sebab itu, Sunggono juga telah menetapkan strategi untuk memberikan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dalam merekrut tenaga kesehatan di seluruh kecamatan termasuk desa yang anggarannya dilekatkan pada BKKD.

Selain pada desa, Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar juga akan dialokasikan anggaran untuk mengangkut barang dan orang ke wilayah yang sulit terjangkau oleh pangan. Disamping itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat pra sejahtera melalui bantuan bagi nelayan, termasuk bantuan BBM.

Dalam kesempatan tersebut, Sunggono juga telah mewanti-wanti agar Disperindag Kukar harus bisa menyelesaikan target capaian kinerja. Yakni melakukan Sertifikasi Halal terhadap 60 ribu pelaku UMKM di Kukar. "Ada 60 ribu UMKM di Kukar, tapi yang baru dianggarkan Rp 500 juta karena pemerintah pusat telah menginstruksikan di tahun 2024 UMKM harus mempunyai sertifikasi halal," tutupnya. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i



JAGA KONDUSIFITAS DAERAH, PUPUK KALTIM KOORDINASI PENGAMANAN BERSAMA UNSUR MASYARAKAT



BACA HALAMAN A2

**PT Qisbelian Snack Indonesia
Juara 2 di Ajang IMA UMKM
AWARDS Tingkat Nasional**





Jaga Kondusifitas Daerah, Pupuk Kaltim Koordinasi Pengamanan Bersama Unsur Masyarakat

BONTANG - Tingkatkan sinergi dalam mengoptimalkan pengamanan kawasan guna menjaga operasional perusahaan dan kondusifitas wilayah, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) gelar koordinasi pengamanan eksternal bersama unsur masyarakat dan stakeholders di Kota Bontang. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Equator Bontang, Selasa (17/10/2023).

VP Keamanan Pupuk Kaltim I Made Darmadi Giri, menyampaikan kegiatan ini sengaja digagas untuk saling bertukar wawasan terkait langkah pengamanan yang diterapkan di lingkungan Pupuk Kaltim dan sekitar perusahaan, sekaligus upaya menjaga kondusifitas wilayah dan kawasan dengan peran serta masyarakat hingga stakeholders terkait.

"Melalui koordinasi pengamanan ini, diharap semakin meningkatkan sinergitas antara Pupuk Kaltim dengan seluruh unsur masyarakat dan stakeholder, sehingga keamanan dan kondusifitas dapat terus kita jaga bersama," ujar Made.

Dijelaskannya, Pupuk Kaltim sebagai obvitnas yang beroperasi di Kota Bontang, menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2019, tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang pengamanan Obvitnas.

Hal tersebut mengingat aspek keamanan merupakan faktor utama dalam memastikan kelangsungan operasional Pupuk Kaltim, agar senantiasa dapat melak-

sanakan aktivitas produksi secara lancar.

Selain sistem manajemen pengamanan yang kuat, kondusifitas kawasan juga sangat ditentukan adanya dukungan dan sinergitas seluruh unsur terkait hingga masyarakat, guna memastikan keamanan agar terus terjaga dengan baik. Hal ini menjadi salah satu fokus yang dikedepankan Pupuk Kaltim, sehingga perusahaan dapat terus tumbuh dan memberi manfaat bagi masyarakat hingga pembangunan daerah.

"Maka dari itu, kita dapat memperkuat komitmen bersama untuk menjaga serta peduli dengan saling dukung menciptakan situasi kondusif di Kota Bontang," tambah Made.

Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya, melalui Kasubag Kerma Bag Ops Iptu Sodik Suhartanto, menilai koordinasi dalam menjaga keamanan wilayah penting dilakukan, utamanya yang berkaitan dengan operasional Perusahaan. Dari hal itu situasi dapat senantiasa terkendali tidak hanya dari sisi Pupuk Kaltim, tapi juga wilayah sekitar dengan dukungan seluruh unsur masyarakat.

Menurut Yusep, pengamanan Pupuk Kaltim dan kawasan perusahaan juga bagian dari tugas kepolisian, mengingat obvitnas sebagai aset negara penting untuk terjaga agar terus beroperasi dengan lancar. Maka dari itu sinergi yang terjalin antara seluruh unsur perlu diperkuat.

"Komitmen ini hendaknya bisa terus kita

jaga dengan baik, agar kondusifitas Bontang dan operasional Pupuk Kaltim sebagai salah satu obvitnas dapat terjaga dengan dukungan seluruh unsur masyarakat," ucap Iptu Suhartanto.

Senada, Komandan Kodim 0908 Bontang melalui Danramil Loktuan Kapten Inf Niko Katani, pun menyebut keamanan obvitnas merupakan salah satu fokus TNI dalam hal pengamanan wilayah, dengan melibatkan prajurit hingga tingkat Bintara Pembina Desa (Babinsa). Namun hal ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat.

"Kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan hal tersebut, sehingga keamanan wilayah dengan situasi yang kondusif bisa berjalan sesuai harapan," ucap Kapten Inf Niko.

Dirinya pun mendukung kegiatan ini dilaksanakan berkesinambungan, sehingga dinamika yang berpotensi mengancam keamanan wilayah hingga berdampak terhadap operasional perusahaan maupun lingkungan bisa diantisipasi dengan baik. Kata dia, masyarakat sudah sepatutnya turut bertanggungjawab dalam menjaga keamanan, minimal di lingkungan masing-masing.

"Jika ini bisa terimplementasi dengan baik, maka Bontang yang kondusif sudah pasti terwujud. Kami sebagai prajurit memastikan sangat fokus terhadap keamanan wilayah dan masyarakat, sehingga sinergi untuk tetap menjaga hal tersebut penting terjalin," pungkasnya. (ADV)



Salah satu piagam penghargaan yang didapatkan oleh RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi S)

RSUD Raih Akreditasi Rumah Sakit Tipe B Tingkat Kelulusan Paripurna

BONTANG - RSUD Taman Husada Bontang kerap meraih penghargaan. Penghargaan terbaru di tahun 2023 ini, RSUD mendapatkan Akreditasi dan penghargaan terbaik dari fasilitas kesehatan Rumah Sakit Tipe B.

Tri Ratna Paramita, Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Taman Husada menjelaskan, akreditasi itu dengan tingkat kelulusan paripurna, atau Bintang 5.

Dijelaskannya, pertama tentang akreditasi rumah sakit dimana melakukan survei penilaian di Februari dan awal Maret. Hasilnya sudah keluar dengan terakreditasi Pari Purna atau Bintang 5, Bintang paling tinggi.

Artinya, 5 bintang yang sudah RSUD Bontang dapatkan, jadi akreditasi penilaian mutu, bentuk penilaian mutu rumah sakit yang diakui oleh negara. Dimana setiap rumah sakit harus terakreditasi dengan tingkatan paling tinggi adalah yakni bintang 5 atau dengan sebutan Pari Purna. Selain mutu, ke arah keselamatan pasien, manajemen resiko rumah sakit, pencegahan infeksi, semua ada di dalam situ menjadi satu.

Kedua, mendapatkan penghargaan terbaik dari fasilitas kesehatan rumah sakit tipe B yang ter-

baik dari Bapeten, terhadap pelaporan untuk sinar radiasi.

RSUD Bontang rutin melakukan pelaporan dan perizinan oleh tenaga yang kontak langsung dengan radiasi. Terutama di bagian radiologi.

"Penghargaan yang paling bergengsi adalah tingkat nasional tahun 2022 oleh JKN. Kami mendapatkan juara satu untuk rumah sakit tipe B yang terbaik, oleh JKN. Tahun ini, kita maju lagi mewakili cabang, akan tetapi hanya sampai di wilayah saja. Kami kalah di tahap wilayah, dan di tahap selanjutnya tidak mendapatkan," bebernya.

Ratna juga menambahkan, jika mau diikuti untuk mendapatkan piagam penghargaan sangat banyak, seperti inovasi pelayanan publik, dan ada juga evaluasi pelayanan publik. Akan tetapi terkadang dengan waktu yang jaraknya sangat singkat dan bersamaan, sehingga tidak sempat untuk mengikuti.

"Kami saat ini sedang penilaian evaluasi pelayanan publik di 2023, dimana rumah sakit merupakan fokus tujuan untuk jadi penilaian. Sampai sekarang hasilnya kami belum menerima, mudahan saja kami bisa menaikkan nilainya dan bisa meraih penghargaan," ucapnya. (dwi/adv)



Kegiatan praktik pelatihan alat berat di Danau Kanaan dan Belakang Bank Dhanarta. (Dwi S)

Pelatihan Operator Alat Berat Dinas PUPRK Masuk Tahap Praktik

BONTANG – Pelatihan Operator Alat Berat garapan Bidang Bina Konstruksi (Bikon) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang memasuki tahap praktik, Rabu (18/10/2023). Praktik berlangsung di dua lokasi.

Pertama, Excavator PC 200 berlangsung di lingkungan Danau Kanaan. Kedua, Excavator Long Arm di belakang Bank Dhanarta. Kegiatan berlangsung bersamaan, dengan nantinya peserta akan bergantian.

"Nantinya mereka pun akan dirolling secara bergantian, dan sekaligus ada 15 calon supir dumtruck," beber Kadis PUPRK, Usman melalui Kabid Bikon, Dedy Nugraha.

Dedy menambahkan, dengan adanya pelatihan ini, nantinya mereka para peserta mendapatkan sertifikat nasional, keahlian, dan wawasan tiap masing-masing bidang.

"Nantinya di hari terakhir, tepat 12 hari semuanya akan diuji. Pengujinya pun langsung dengan kementerian. Berbeda instruktur pelatihan dengan tes ujian nantinya," ungkapnya.

Ade Ratnasari, Seksi Pengaturan dan Pengawas Jasa Konstruksi menga-

takan, dengan adanya kegiatan bimbingan teknik pelatihan dan sertifikasi operator alat berat ini bertujuan untuk menambah pengetahuan buat para operator, terutama operator PU sendiri dan untuk para pekerja umum.

"Pelatihan ini kita batasi, hanya 50 orang saja, karena dengan anggaran yang sangat terbatas," paparnya.

Dalam pelatihan ini, para peserta akan mendapatkan sertifikat yang berlaku nasional. Karena, jika pun nantinya ada yang terpilih bisa langsung bekerja di IKN.

"Banjarmasin itu sebagai pelaksana, dan langsung dari kementerian. Oleh karena itu, anggaran pun langsung dari kementerian, jadi kita saling sharing anggaran. Kemaren pun ada tukang kami juga yang langsung bekerja di IKN, bagian baja ringan," ungkapnya.

Kegiatan ini pun sudah berlangsung selama dua hari, terhitung sampai tanggal 28 Oktober 2023 mendatang. Untuk pelatihan ini diikuti sebanyak 15 dumtruck dan 17 hekso.

"Adanya pelatihan ini diharapkan tenaga kerja di Kota Bontang siap bersaing di tingkat lokal maupun nasional. Pelatihan ini gratis tidak membayar, ka-

lau pun membayar sendiri dengan biaya yang cukup mahal. Jadi, warga Bontang bisa mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin," ucapnya.

Ada beberapa persyaratan untuk lolos mengikuti pelatihan dan sertifikasi ini, antara lain adalah dengan foto 3x4 dengan latar merah, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan diutamakan dengan KTP Kota Bontang.

Untuk jenjang satu, persyaratan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Operator alat berat ini dengan jenjang dua, dengan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Jika pun dari SMK tanpa pengalaman, akan tetapi kalau dari lulusan SMA harus wajib membuat surat pengalaman kerja dari kantor kelurahan dengan minimal dua tahun pengalaman kerja, dan kalau SMP dengan 12 tahun pengalaman kerja," tutupnya.

Sementara itu, untuk pelatihan pertukangan dan alat berat melakukan pelatihan selama 12 hari. 4 hari teori dan 8 hari praktik.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam



Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Raperda penyelenggaraan perpustakaan. (Yusva Alam)

Pembahasan Raperda Perpustakaan Masih Alot Masalah Sanksi

BONTANG - Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bontang tentang penyelenggaraan perpustakaan kembali diadakan, Selasa (3/9/2023) di Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang. Di rapat ini mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menjelaskan bahwa di rapat kerja kali ini membahas pasal 30 dan 31 terkait sanksi terhadap seluruh penyelenggara perpustakaan, baik di sekolah SD dan SMP, maupun di setiap OPD khususnya di dinas pendidikan.

Pembahasan sanksi itu lantaran ada pasal yang menyebutkan, di butir A dan B ada sanksi tertulis dan sanksi pemberhentian pembinaan.

"Pembahasan sanksi ini masih alot. Itu yang kami minta untuk dikoordinasikan ulang oleh Disdikbud dan DPK," ujar Raking yang memimpin jalannya rapat.

Ditambahkannya, sanksi itu diadakan karena ada kebijakan wajib baca 3 buku dalam setahun bagi setiap murid yang ingin dibuat dalam raperda ini.

Pihaknya meminta apa-apa saja poin-poin yang akan diberikan bagi sekolah-sekolah yang tidak mengikuti kebijakan baca 3 buku setahun tersebut.

"Yang bikin alot pembahasannya ada-

lah adanya usulan sanksi yang berbunyi setop pemberian BOS dan BOSDA bagi yang melanggar. Sanksi itu masih dirasa berat oleh Disdikbud. Kadisdikbud Bambang masih merasa berat dengan sanksi itu," bebernya.

Dengan masih alotnya pembahasan sanksi, maka pembahasan raperda perpustakaan yang harusnya sudah berakhir, maka masih berlanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya.

"Kalau menurut saya harusnya selesai hari ini. Karena kendala pembahasan sanksi ini, tidak bisa dibilang berapa kali lagi akan selesai. Kalau tidak dapat titik temunya ya belum bisa selesai," pungkasnya. (al/adv)



PT Qisbelian Snack Indonesia Juara 2 di Ajang IMA UMKM AWARDS Tingkat Nasional

JAKARTA - Indonesia Marketing Association (IMA) menyelenggarakan ajang IMA UMKM AWARDS di Jakarta pada 14 Oktober 2023 sebagai bagian dari pengembangan ekosistem pembinaan dan pemasaran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Rangkaian Seleksi IMA UMKM Award telah dilaksanakan sejak Mei hingga Oktober, di mana pada tahap seleksi diikuti 477 UMKM dari seluruh Indonesia yang dibagi menjadi 2 golongan, yaitu UMKM dan Pariwisata.

Dari 477 peserta yang telah melewati tahap seleksi hingga pelatihan, sebanyak 6 UMKM terpilih menjadi finalis untuk kategori wisata dan umum, dan mengikuti penjurian pada 14 Oktober 2023 di Ballroom Century Park Hotel Jakarta.

Penilaian pemenang didasarkan pada tiga kriteria, yaitu pengembangan bisnis, sistematika paparan, dan kemampuan presentasi.

Pemenang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan business matching dengan beberapa perusahaan, baik dari segi permodalan maupun pengembangan usaha.

Handrini, selaku pemilik PT. Qisbelian Snack Indonesia, merasa bersyukur dan bahagia bisa mengikuti kegiatan IMA UMKM AWARD 2023 karena banyak ilmu dan masukan yang didapatkan.

"Saya bersyukur mendapatkan kesempatan mengikuti IMA UMKM AWARDS

2023 ini. Karena dari sini saya sadar selama ini mindset saya salah, hanya mindset pedagang bukan entrepreneur. Selama ini saya hanya fokus bagaimana produk saya habis bukan bagaimana bisnis saya berkembang. Dari IMA UMKM AWARDS 2023, saya belajar bagaimana bisnis saya bisa berkembang, berjalan lancar sesuai dengan target dan rencana kedepan. Sebuah bisnis tidak akan bisa berkembang tanpa marketing. Dan marketing itu lebih dari sekedar memasarkan produk, tetapi juga bagaimana menentukan target pasar, branding, dan menentukan nilai produk itu sendiri," ungkapnya.

PT Qisbelian Snack Indonesia merupakan UMKM binaan PT. Pama Persada Nusantara yang berkolaborasi dengan Yayasan Dharma Bhakti Astra melalui Lembaga Pengembangan Bisnis. UMKM ini menjadi satu-satunya perwakilan Kalimantan Timur, khususnya Bontang, yang berhasil masuk dalam tiga besar ajang IMA UMKM Awards dan mengikuti kegiatan penjurian final di Jakarta dengan dewan juri Bapak Suparno Djasmin, YW Junardy, Juan Permata, Erik Hidayat, dan dua juri lainnya.

PT Qisbelian Snack Indonesia keluar sebagai juara kedua umum untuk kategori wisata di ajang IMA UMKM Awards, sebuah prestasi yang membanggakan bagi PT. Pama Site Indo sebagai perusahaan yang membina langsung UMKM tersebut.

Hal ini menjadi indikasi bahwa program pembinaan yang selama ini dilakukan memberikan manfaat dan berkualitas sehingga dapat mengantarkan PT Qisbelian Snack Indonesia menjadi juara dalam ajang kegiatan dengan lingkup nasional.

Handrini, selaku pemilik dari PT. Qisbelian Snack Indonesia, mengungkapkan rasa syukurnya bisa menjadi salah satu binaan CSR PT. Pama Site Indo melalui LPB Pama Bessai Berinta (YDBA).

"Saya juga sangat bersyukur, sebagai UMKM binaan PAMA yang berkolaborasi dengan YDBA Jakarta melalui LPB PAMA Bessai Berinta, selama ini program yang kami terima juga terfokus pada pemasaran dan pengembangan bisnis. Mulai dari pelatihan, pendampingan, mengarah pada bagaimana pemasaran produk binaan bisa bertambah dan selalu mengedepankan kualitas. Saya berharap selanjutnya dapat terus berkolaborasi dengan baik PT. PAMA maupun YDBA untuk kemajuan bisnis saya dan UMKM lainnya," ungkapnya.

Disampaikan oleh Apak Adang Adha, selaku ketua pelaksana kegiatan tersebut, dalam suatu momen berbincang bersama Handrini, pemilik PT Qisbelian Snack Indonesia, agar pencapaian dan kemampuannya tidak berhenti sampai di sini saja. Ke depannya, Handrini harus bisa menyebarkan pengalaman serta kemampuannya agar bermanfaat bagi UMKM lainnya, khususnya di Kawasan Kalimantan. (ADV)



Berikut Kecamatan dengan Sebaran Proyek Usaha Terbanyak!

BONTANG - Kota Bontang memiliki banyak sebaran proyek berbentuk UMKM dan perusahaan, yang masing-masing tersebar di tiga Kecamatan yang ada di Bontang.

Kecamatan Bontang Utara menjadi salah satu kecamatan yang memiliki sebaran proyek usaha per kecamatan terbanyak. Hal itu diungkapkan Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPTSP Bontang, Natalia Santi Kanan.

"Sekali lagi DPMPTSP menerbitkan ini berdasarkan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) kami selalu berpatokan

dengan sistem tersebut," jelasnya.

Data ini dihitung berdasarkan OSS-RBA sejak 4 Agustus 2021 hingga 16 Oktober 2023. Dengan banyak 8.591 proyek usaha di Kecamatan Bontang Utara, kemudian sebanyak 4.713 proyek usaha di Kecamatan Bontang Selatan dan terakhir sebanyak 2.045 sebaran proyek usaha di Bontang Barat.

"Kemungkinan masih ada yang belum membuat NIB sehingga belum terdaftar dalam OSS-RBA tersebut, tapi karena kita rutin melakukan kontrol lapangan memastikan tiap usaha mendaftarkan usahanya ke DPMPTSP," tutupnya. (sya/adv)

Karhutla di Bontang Berulang Mengapa?

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kota Bontang masih terus terjadi. Berdasarkan catatan BPBD Bontang sejak Januari hingga September, musibah tersebut menghabiskan 80,41 hektare.

Selain pembukaan lahan, penyebab terjadinya Karhutla ialah cuaca ekstrem kemarau yang disebabkan adanya fenomena el nino, sehingga ranting ataupun dahan kering mudah terbakar.

Petugas BPBD Bontang diminta rutin melakukan patroli hutan dan lahan. Tak hanya itu, upaya sosialisasi kepada masyarakat juga digalakkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau ini. (bontangpost.id, 3/10/2023)

Karhutla menjadi masalah di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebesar 28.019 hektare hutan dan lahan yang terbakar pada periode Januari-Juni 2023.

Karhutla tercatat melepaskan 2,84 juta emisi karbon dioksida dengan efek rumah kaca yang berdampak terjadinya pemanasan global. Karhutla membahayakan nyawa manusia, bisa mengakibatkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala batuk dan sesak napas.

Kabut asap karena karhutla bisa mengganggu penerbangan karena jarak pandang yang terbatas. Tidak hanya manusia, karhutla bisa merusak habitat hewan-hewan dan menyebabkannya mati.

Ulah Manusia

Karhutla tidak hanya terjadi di Bontang saja, tetapi hampir di semua daerah khususnya Kaltim. Karhutla terus berulang, membuktikan pemerintah gagal dalam mencegah terjadinya Karhutla.

Karhutla terjadi bukan hanya karena fenomena panas/El Nino kemarau tetapi karena ada unsur kesengajaan manusia dalam membuka lahan dengan cara dibakar. Walaupun musim kemarau sudah mulai berakhir tetapi persoalan karhutla masih terus berulang.

Banyak warga yang melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan lalu dijadikan perkebunan, seperti perkebunan sawit. Ini menunjukkan rendahnya kes-



Oleh:

Emirza Erbayanthi, M.Pd

Pemerhati Sosial

adaran warga untuk menjaga kelestarian hutan.

Membakar hutan dan lahan untuk dijadikan perkebunan dikarenakan dorongan ekonomi. Karena perekonomian sulit, mencari kerja susah, dan PHK di mana-mana, dan pemerintah tidak menjamin kesejahteraan warganya. Maka kondisi ini mendorong untuk berbuat apa saja, asal bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga walaupun mengorbankan kelestarian lingkungan.

Tidak cukup himbauan, sosialisasi dan patroli jika pemerintah tidak tegas terhadap pelaku karhutla dan memberikan edukasi juga fasilitasi kepada petani termasuk mengembalikan tata

kelola hutan dan lahan kepada negara.

Tetapi pemerintah justru memberi konsesi hutan kepada pengusaha untuk dijadikan perkebunan sawit. Penanaman sawit digenjut untuk keperluan ekspor dan sebagai bahan baku biofuel, utamanya biodiesel. Maka, terjadi alih fungsi hutan yang sangat masif untuk dijadikan lahan perkebunan sawit.

Maka, karhutla terjadi bukan semata ulah individu yang membakar hutan, tetapi lebih karena kebijakan negara yang melegitimasi. Kebijakan pemerintah yang mudah memberikan konsesi hutan untuk kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit merupakan kebijakan yang merusak lingkungan.

Akibat dari kebijakan ini, bencana alam marak terjadi, seperti karhutla. Korbannya adalah rakyat di wilayah tersebut. Kebijakan kapitalistik negara ini tidak lepas dari sistem ekonomi kapitalisme yang Indonesia terapkan. Sistem ini menghalalkan segala cara, walaupun mengakibatkan kerusakan bumi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Menjaga Kelestarian Alam

Allah Swt. telah mengingatkan manusia tentang bencana yang terjadi ketika manusia merusak bumi. Firman-Nya,

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan

Lanjutan Catatan

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS Ar-Rum: 41).

Islam melarang umatnya berbuat kerusakan di muka bumi. Firman Allah Taala,

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." (QS Al-A'raf: 56).

Menjaga kelestarian alam adalah tugas semua pihak, individu rakyat, perusahaan, juga negara. Tetapi, menjadi tugas negara untuk mengedukasi rakyatnya, individu hingga perusahaan, untuk menjaga alam dengan baik. Proses edukasi ini dilakukan oleh negara melalui jalur pendidikan.

Proses edukasi dilakukan bukan hanya dengan memberikan informasi tentang pelestarian lingkungan, tetapi menyatu dengan kurikulum yang berbasis akidah Islam. Artinya, kesadaran yang dibentuk pada warga negara adalah kesadaran yang berbasis keimanan.

Maka ada dorongan ruhiah di setiap individu untuk menjaga kelestarian alam, yaitu sebagai wujud ketatan kepada Allah Taala. Motivasi ruhiah ini akan lebih efektif daripada motivasi lainnya.

Sistem Islam

Sistem Islam akan melaksanakan amanat Allah Taala agar manusia menjaga kelestarian alam. Caranya dengan melakukan langkah antisipatif melalui pemberian edukasi dalam kurikulum pendidikan.

Langkah antisipatif lainnya adalah pemerintah akan memberi jaminan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan) pada setiap individu rakyat. Maka, rakyat di sekitar hutan tidak ada dorongan ekonomi untuk merusak hutan.

Pemerintah juga menerapkan ekonomi Islam maka pembangunan ekonomi tidak berjalan secara kapitalistik yang merusak alam. Pembangunan ekonomi dalam Islam akan memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga tidak merusak alam.

Pemerintah Islam memosisikan hutan sebagai kepemilikan umum maka negara tidak akan menyerahkan pengelolaan hutan kepada swasta. Negaralah yang akan mengelolanya. Negara akan memilih sumber energi yang ramah lingkungan, baik dari sisi emisi yang dihasilkan atau potensi kerusakan pada produksinya.

Negara akan menjaga luas hutan pada level yang tetap menjaga kelestariannya. Pada hutan tertentu seperti suaka margasatwa dan hutan lindung, negara akan memproteksinya sehingga terkategori kepemilikan negara dan tidak boleh ada pengambilan hasil hutan sama sekali. Hal ini demi menjaga kelestarian ekosistem yang ada di dalamnya.

Negara juga akan menindak tegas individu maupun perusahaan yang melakukan perusakan hutan. Negara akan memberi sanksi tegas pada oknum-oknum yang terbukti memberi akses pada perusakan hutan.

Islam mencegah Karhutla dengan sanksi tegas. Penguasa dalam Islam memberikan edukasi dan perhatian lebih kepada petani berupa modal dan fasilitas agar petani tidak membakar lahan. Tata kelola kepemilikan hutan dan lahan dalam Islam.

Sikap tanggap penguasa dalam Islam jika masih terjadi karhutla termasuk alat canggih dan petugas handal. Karhutla akan tuntas diselesaikan hanya dengan paradigma dan sistem Islam. Begitulah langkah Islam menyelesaikan karhutla dan menjaga kelestarian alam.

Wallahualam.



TANGGAPI SE BUPATI SOAL LARANGAN PENGE CER BBM, BEGINI KATA MADRI



**MINTA PEMERINTAH MAKSIMAL
MENGAWASI ILLEGAL FISHING**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

TANGGAPI SE BUPATI SOAL LARANGAN PENGECEK BBM, BEGINI KATA MADRI

TANJUNG REDEB - Adanya Surat Edaran (SE) Bupati mengenai larangan pengecek Bahan Bakar Minyak (BBM) ditanggapi Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Dia menilai, dengan keluarnya SE Bupati tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus mengevaluasi hal itu bersama dengan pihak terkait.

Dijelaskan Madri, evaluasi penting dilakukan agar mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai BBM di Bumi Batiwakkal.

"Seharusnya Kabag Ekonomi turun ke lapangan untuk mengecek BBM langsung ke Jobber yang ada di Samburakat. Bahkan saya pernah melakukan sidak, namun dianggap sepele, padahal sangat berdampak sekarang," ujarnya.

Dirinya menerangkan, untuk mengetahui kebutuhan BBM masyarakat umum hingga sektor pertanian dan perikanan, seharusnya ada kajian mengenai jumlah penduduk dan kendaraan.

Dibeberkannya, SPBU yang ada di Berau sejumlah 14 SPBU. Namun kuota yang didapatkan Berau jauh

lebih sedikit daripada Bulungan yang hanya 4 SPBU.

"Hal Itu yang harus diwaspadai dan dipertanyakan. Pemkab juga harusnya mengkaji berapa jumlah penambahan kendaraan roda dua maupun roda empat setiap tahunnya," tegasnya.

Madri juga menyinggung soal larangan penjualan BBM eceran. Padahal, kata dia, hal tersebut membantu masyarakat memperoleh BBM dalam 24 jam. Terlebih saat ini, di Berau belum ada SPBU yang buka 24 jam.

"Tetapi pihak SPBU tidak bisa disalahkan sepenuhnya, kenapa tidak beroperasi 24 jam, sedangkan jatah BBM saja masih kurang. Dengan adanya pengetab ini saya rasa membantu masyarakat yang membutuhkan BBM pada malam hari," tuturnya.

Dirinya berharap, pemerintah segera memberi solusi dan mengevaluasi persoalan yang terjadi saat ini. "Terutama soal BBM. Ajak seluruh pihak dan instansi terkait untuk diskusi agar persoalan ini ada jalan keluarnya," tandasnya. (adv/set)



Foto bersama masyarakat dengan Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah saat reses.

RESES III, SYARIFATUL TERIMA BEBERAPA ASPIRASI MASYARAKAT

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah menggelar reses masa sidang III di Gang Jeruk, Kelurahan Sei Bedung pada Selasa (17/10/2023).

Ia menuturkan, masyarakat setempat menyampaikan beberapa aspirasi, yakni semenisasi gang, bedah rumah hingga kegiatan sosial seperti sunatan massal.

"Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan saya tampung. Warga yang menghadiri reses saya juga sangat antusias," katanya.

Perempuan yang akrab disapa Sari ini menilai, aspirasi yang diterimanya bukan merupakan permintaan yang sulit. Maka dari itu, dirinya mengaku optimistis dapat merealisasikannya pada tahun 2024 mendatang.

"Usulan mengenai semenisasi gang dan su-

natan massal akan direalisasikan. Kalau bedah rumah, nanti bisa dimasukkan ke anggaran aspirasi anggota DPRD," jelasnya.

Dirinya membeberkan, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai banjir yang kerap terjadi kala hujan.

"Saya akan berkoordinasi dengan OPD terkait, agar permasalahan banjir tersebut bisa segera secepatnya diselesaikan," tuturnya.

Politikus Golkar ini berharap, apa yang menjadi aspirasi masyarakat di reses III akhir tahun ini, khususnya masyarakat di RT 003 Kelurahan Sei Bedung bisa terealisasi.

"Terimakasih kepada warga yang hadir dan menyampaikan aspirasi, semoga saya sebagai perwakilan rakyat bisa terus memperjuangkan apa yang dibutuhkan," pungkasnya. (adv/set)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo.

JEMBATAN GANTUNG GUNUNG SARI MEMPRIHATINKAN, HARAP GERAK CEPAT PEMERINTAH

TANJUNG REDEB – Kondisi Jembatan Gantung Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah cukup memprihatinkan. Hal itu disorot Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo.

Dia membeberkan, selama ini perbaikan jembatan tersebut dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat yang sehari-hari menggunakan akses jalan itu.

Menurutnya, jika mengandalkan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk membenahi jembatan tersebut, tentu tidak cukup. "Sehingga harus dicarikan solusi lain agar bisa menyelesaikan permasalahan itu," katanya.

Dirinya menyebut, untuk menindaklanjuti permasalahan itu pemerintah kampung harus mengajukan kepada pemerintah kabupaten

untuk melakukan perbaikan.

"Opsi lainnya yaitu menggunakan CSR perusahaan setempat. Jadi pemerintah kampung harus berkomunikasi dulu dengan pihak perusahaan," ujarnya.

Diketahui, kondisi Jembatan Gantung Gunung Sari itu rantai kayu mulai rusak hingga besi penyangga sudah berkarat. Maka dari itu, Falentinus mengaku akan mengkomunikasikan secepatnya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Jembatan itu menjadi penghubung yang sangat penting. Saya harap ada respons cepat, karena kalau kerusakan semakin parah, maka pengeluaran juga semakin besar," pungkasnya. (adv/set)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena.

MINTA PEMERINTAH MAKSIMAL MENGAWASI ILLEGAL FISHING

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena mendorong pemerintah memaksimalkan pengawasan dan pengamanan terhadap illegal fishing.

Ia menuturkan, agar pengawasan dapat maksimal, pemerintah harus membangun pos penjagaan. "Sehingga nelayan-nelayan yang menangkap ikan dengan cara yang salah bisa segera ditindak," ungkapnya.

Illegal fishing, kata Darlena, jika dibiarkan berlarut-larut dapat merusak ekosistem laut, sehingga perlu perhatian serius antar seluruh pihak.

"Saya apresiasi upaya pemerintah karena sudah rutin melakukan sosialisasi setiap tahunnya untuk mengingatkan masyarakat terkait masalah ini," ucapnya.

Darlena menilai, selain memengaruhi eko-

sistem laut, illegal fishing juga akan mematikan sektor pariwisata. Sebab keindahan destinasi wisata dapat rusak akibat pengeboman ikan.

"Banyak dampak buruknya, kualitas ikan juga jadi tidak bagus," imbuhnya.

Politikus Partai NasDem ini juga mendukung dan memberdayakan para nelayan dengan memberikan bantuan berupa mesin ketinting dan mesin dompeng untuk memudahkan para nelayan untuk pergi ke laut.

"Dari reses tiap tahunnya kita akan realisasikan bantuan ini dari masyarakat baik di anggaran murni maupun perubahan," bebrnyanya.

Darlena berharap, dengan adanya peraturan yang dibuat secara khusus, bisa berpengaruh besar ke masyarakat. khususnya para nelayan. "Tentu, bersama-sama menjaga laut Berau ini," tutupnya. (adv/set)



Anggota
Komisi III
DPRD Berau,
Subroto.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

HARAP ANGGARAN UNTUK PENDIDIKAN DITAMBAH

TANJUNG REDEB – Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau diharapkan Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong sektor pendidikan diperhatikan.

Dia menilai, jika dibandingkan dengan daerah lain, pendidikan di Bumi Batiwakkal belum terlalu maju atau berkembang.

“Itu karena masih banyaknya sekolah di Berau yang fasilitasnya masih kurang. Begitu juga halnya dengan tenaga pengajarnya,” ungkapnya.

Ditanya mengenai alokasi anggaran 20 persen dari APBD untuk pendidikan, Peri membenarkan hal tersebut. Namun, dinilainya untuk pembangunan masih kecil.

“Kalau untuk penambahan ruangan di sekolah itu yang sulit. Termasuk juga memperhatikan sekolah yang ada di kampung maupun pedalaman,” ujarnya.

Dirinya memaparkan, untuk pembangunan fisik di sektor pendidikan masih sangat kecil, yakni sekitar 0,8 persen. Sehingga Peri mendorong pemer-

intah melakukan studi banding ke Surabaya dan Jogjakarta.

“Karena dua daerah tersebut anggaran pendidikan hanya konsentrasi di Dinas Pendidikan, tidak tergabung dengan OPD lain,” jelasnya.

Politikus Gerindra ini mengaku akan mendorong masalah anggaran pendidikan ke Banggar DPRD Berau untuk dipertimbangkan kembali.

“Apalagi permasalahan pendidikan kita cukup kompleks, salah satunya pembangunan fisik yang belum merata di setiap sekolah yang ada,” imbuhnya.

Peri Kombong berharap dunia pendidikan mendapat perhatian lebih. Sebab, sektor tersebut sangat penting. “Jadi memang harus lebih ditingkatkan lagi kualitasnya,” tandasnya. (adv/set)



SOPIR BUS TERMINAL BATU AMPAR MOGOK, RATUSAN PENUMPANG TERLANTAR



**HINDARI MOBIL PUTAR
BALIK, PENGENDARA MOTOR
TEWAS TERJATUH**



Sejumlah sopir Terminal Batu Ampar melakukan aksi mogok.

SOPIR BUS TERMINAL BATU AMPAR MOGOK, RATUSAN PENUMPANG TERLANTAR

BALIKPAPAN - Ratusan penumpang di Terminal Batu Ampar, Balikpapan Utara, telantar pada Rabu (18/10/2023). Hal ini disebabkan para sopir bus mogok mengangkut penumpang tersebut.

Telantarnya para penumpang ini terjadi sejak pukul 07.00 WITA hingga siang ini sekitar pukul 12.00 WITA. Dan sebagian penumpang ada yang memilih bertahan di terminal, namun ada juga yang memilih menggunakan travel.

Salah seorang penumpang, Riswansi, mengatakan bahwa dirinya bersama istri hendak berangkat ke Kota Samarinda. Namun, sejak pukul 07.20 WITA hingga saat ini belum ada penjualan tiket bus. Bahkan bus yang berada di jalur keberangkatan juga tak terlihat.

"Dari pagi tadi menunggu, tapi enggak ada juga ini. Tidak tahu kenapa tidak ada yang menarik," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator sopir bus, Mardin, mengatakan

bahwa para sopir meminta kepada pemerintah dan pihak terkait untuk kembali memberlakukan bahwa kendaraan travel dan truk kecil tidak mengisi BBM jenis Solar di SPBU Kilometer 15.

"Sejak mereka ikut mengisi di sana kita jadi sulit untuk mengisi juga. Biasanya kita datang langsung mengisi Solar subsidi tanpa antrai," ujarnya.

Mardin menambahkan bahwa sejak adanya kendaraan travel dan truk kecil yang ikut antri BBM, para sopir bus bisa mengantre hingga berjam-jam. Dari yang sebelumnya hanya beberapa menit saja.

"Biasanya paling lama 20 sampai 30 menit saja, sekarang sejak ada mereka bisa sampai 3 jam baru kita mengisi," jelasnya.

Para sopir pun telah menghadap ke pengelola Terminal Batu Ampar untuk menyampaikan aspirasinya ini.

Menanggapi hal ini, Pengawas Terminal Batu Ampar, Suliseti-

awan, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima keluhan para sopir tersebut usai pertemuan. Adapun langkah yang akan diambilnya adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar aktivitas di Terminal Batu Ampar bisa kembali normal.

"Ya, saya sudah menerima keluhan teman-teman sopir. Setelah ini saya langsung berkoordinasi dengan Dishub Kota dan Provinsi serta pihak-pihak lainnya terkait hal ini," ujarnya.

Ia pun mengakui bahwa adanya aksi mogok dari para sopir ini telah menyebabkan penumpukan penumpang di Terminal Batu Ampar. "Sejak pagi sudah ada yang di sini. Dan akibat aksi ini sangat terganggu, ya. Banyak penumpang yang terlantar dari pagi sampai siang ini. Semoga semuanya berjalan lancar sehingga bisa kembali normal," tutupnya. (Bom)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus Susanto



Korban pengendara sepeda motor naas yang mengalami lakalantas dan meninggal dunia.

HINDARI MOBIL PUTAR BALIK, PENGENDARA MOTOR TEWAS TERJATUH

BALIKPAPAN - Seorang pengendara sepeda motor yang belum diketahui identitasnya dan mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi KT 3115 YO tewas di tempat, pada Rabu (18/10/2023) sekitar pukul 06.15 Wita di Jalan Jendral Ahmad Yani, Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah.

Kasatlantas Polresta Balikpapan, Kompol Ropiyani mengatakan, kejadian tersebut terjadi disaat Kota Balikpapan tengah diguyur hujan dengan intensitas sedang. Pengendara sepeda motor tersebut dari arah traffic light Gunung Sari menuju Plaza Balikpapan.

"Ketika mendekati putaran Bon-di, ada sebuah mobil memutar berbalik arah dan pengemudi sepeda motor kaget dan terjatuh," ujarnya.

Lebih lanjut Ropiyani menjelaskan, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm pun membentur aspal, sehingga menyebabkan benturan yang cukup keras.

"Karena nggak pake helm benturannya keras sampai keluar darah. Dan dinyatakan meninggal dunia," jelasnya.

Ditambahkan Ropiyani, kecelakaan ini pun merupakan kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh kurang konsentrasinya pengendara sepeda motor.

"Kita sudah mintai keterangan sejumlah saksi-saksi di lokasi kejadian. Dan saat ini masih mencari identitas pengendara motor," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Syarifuddin Oddang saat menggelar Dialog Warga bersama masyarakat Kelurahan Karang Joang di RT 21.

DIALOG BERSAMA WARGA KARANG JOANG, ODDANG TERIMA MASUKAN PEMBANGUNAN

BALIKPAPAN - Dialog Warga kembali digelar oleh anggota DPRD Kota Balikpapan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Utara, salah satunya Syarifuddin Oddang pada Rabu (18/10/2023).

Kegiatan ini dihadiri puluhan warga Jalan Soekarno Hatta, Km 12 Kelurahan Karang Joang dengan mengusung tema "Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Syarifuddin Oddang mengatakan, bahwa program Dialog Warga merupakan program yang diluncurkan DPRD Kota Balikpapan guna dapat menjalin komunikasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar dalam menjalankan tugas pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat setiap anggota DPRD Kota Balikpapan dapat berjalan maksimal.

"Berbagai permasalahan diperbincangkan dalam Dialog Warga ini. Mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan hingga permasalahan pendidikan menjadi topik utama," ujarnya.

Pada kesempatan ini salah seorang warga RT 21, Lina menyampaikan jika di lingkungan tinggalnya menginginkan adanya fasilitas jalan yang bagus. Sehingga saat beraktifitas menggunakan sepeda motor bisa berkendara dengan aman dan nyaman.

"Di RT 21 jalannya masih belum bersemen apalagi aspal. Jadi kalau hujan jalan licin. Saya berharap bisa dilakukan semenisasi agar kalau hujan kita tetap bisa lewat," ujarnya.

Warga lainnya, Rahmatullah menyampaikan perihal kesehatan dalam hal ini BPJS gratis dan masalah pendidikan. "Saya belum mendapat BPJS Kesehatan secara gratis seperti orang-orang lainnya yang sudah dapat. Juga soal sekolah, kita tiap tahun selalu ramai dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kiranya bisa menambah sekolah negeri lagi di Balikpapan Utara ini," jelasnya.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Syarifuddin Oddang menyampaikan, untuk permasalahan akses jalan akan diperjuangkannya dalam program SP-GRM di Kelurahan. "Kalau soal BPJS Kesehatan nanti kita bantu juga prosesnya di kelurahan, karena yang melaksanakannya di sana," ujarnya.

Dengan Dialog Warga ini, Syarifuddin Oddang memastikan akan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan keinginan warga. Namun, warga pun harus bersabar selagi aspirasinya diperjuangkan di DPRD Kota Balikpapan. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA
TERDEPAN

RADAR PASER

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI KAMIS
19 OKT 2023



PEMKAB PASER PERKUAT KETAHANAN PANGAN

**POLRES PASER GELAR OPERASI
MANTAP BRATA, PENGAMANAN
PEMILU 2024 DIMULAI**





PEMKAB PASER PERKUAT KETAHANAN PANGAN

PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai upaya menyediakan pangan bagi penduduk Kabupaten Paser. Gerakan pangan murah ini dilaksanakan guna menyambut Hari Pangan Sedunia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Paser, Katsul Wijaya menyatakan, komitmen ini guna memastikan kebutuhan pokok dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Ketahanan pangan ini selanjutnya mampu menjadikan sumber daya manusia yang sehat.

"Selain itu aktif dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat Undang Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan," kata Katsul Wijaya.

Lanjutnya, beberapa bentuk implementasi program dalam tantangan pembangunan ketahanan pangan termasuk di antaranya

Pembangunan Outlet Pangan Paser. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Paser, Taharudin mengatakan, outlet pangan menyediakan bahan pangan strategis untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.

"Menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau dan mendorong UMKM pangan cepat tumbuh," kata Taharudin.

Dia menuturkan bahan pangan yang dijual berasal para pelaku usaha pangan, baik UMKM Pangan, distributor pangan, BUMN/BUMD Pangan, Gapoktan dan KTNA. "Sehingga harga pangan yang dijual di bawah harga pasar dan dapat membantu masyarakat," ujar Taharudin.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Foto: Kapolres Paser, AKBP Kade Budiarta bersama jajaran Forkopimda Paser

POLRES PASER GELAR OPERASI MANTAP BRATA, PENGAMANAN PEMILU 2024 DIMULAI

PASER - Kepolisian Resort (Polres) Paser memantapkan proses pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang dengan menggelar pasukan pada apel Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Halaman Polres Paser, Selasa (17/10/2023).

Adapun Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini berlangsung selama 222 hari, yakni 74 hari selama 2023 dan 148 hari selama 2024. Operasi ini dimulai sejak pendaftaran Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023.

"Jadi pelaksanaan dari pada apel gelar pasukan ini bermaksud untuk mengecek kesiapan baik sarana dan prasarana maupun personel," kata Kapolres Paser, AKBP Kade Budiarta, Rabu (18/10/2023).

Operasi ini, kata Budi, didukung penuh oleh Komando Distrik Militer (Kodeim) 0904/PSR dan Pemerintah Kabupaten (Pemekab) Paser. "Harapan kami kegiatan Pemilu 2024, berjalan aman, tertib dan lancar," harapnya.

Ia melanjutkan pengamanan Pemilu 2024 yang telah berjalan di antaranya Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota), Pra Operasi dan apel gelar pasukan. Sehingga dari beberapa persiapan ini dinilai matang untuk proses pengamanan nantinya.

"Kesiapan kami sudah cukup. Namun kami berharap kesadaran masyarakat bagaimana menciptakan situasi Pemilu ini berjalan dengan aman lancar," lanjutnya.

Wakil Bupati Paser, Syarifah Masitah Assegaf, memberikan apresiasi atas digelarnya Operasi Mantap Brata ini. Dia memastikan Pemkab Paser siap mendukung segala kebutuhan yang diperlukan nanti untuk pengamanan.

"Kita harapkan pengamanan yang baik dalam Pemilu ini berjalan dengan tertib, aman dan lancar karena bagaimanapun aktivitas di Kabupaten Paser harus terus terjaga," tandasnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI KAMIS
19 OKT 2023



BAWASLU KALTIM GELAR P2P, DORONG PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PEMILU 2024





Narasumber saat memberikan materi pada kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Bawaslu Kaltim 2023.

BAWASLU KALTIM GELAR P2P, DORONG PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PEMILU 2024

SAMARINDA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu RI 2023, di Kota Samarinda Provinsi Kaltim pada Rabu (18/10/2023) bertempat di Swiss-Belhotel Borneo Samarinda.

Acara yang rencananya akan dihelat selama 3 hari dari tanggal 18 - 20 Oktober 2023 ini, diikuti ratusan peserta mahasiswa yang berasal dari 3 kabupaten, yakni Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kabupaten Berau dan Kutai Barat (Kubar).

"Acara ini diikuti oleh mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi yang ada di sekitar Samarinda, dan mahasiswa tersebut berasal dari 3 kabupaten," ungkap Komisioner Bawaslu Kaltim, Galih Akbar

Tanjung saat ditemui Mediakaltim.com di sela-sela acara.

Galih menyebutkan tujuan P2P bagi mahasiswa ini, diharapkan mahasiswa dapat mengikuti acara dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam pengawasan pemilu.

"Kami berharap dengan bekal pengetahuan mahasiswa selama di sini, selain meningkatkan partisipasinya terhadap pemilu, mahasiswa nantinya juga bisa memberikan informasi dan pengetahuan yang didapatkan di sini kepada kawan-kawan mahasiswanya yang lain dan kepada masyarakat, dari kegiatan yang diikuti di Bawaslu ini," haranya.

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Ivan Jaya, Ketua Umum Bubuhan Driver Gojek Samarinda (BUDGOS) sekaligus Koordinator Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB)

BBM NAIK LAGI, PENGEMUDI OJEK ONLINE KELUHKAN TIDAK ADA PENYESUAIAN TARIF

SAMARINDA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina disebut berdampak besar bagi para pengemudi ojek online (ojol).

Seperti diketahui, beberapa layanan penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menaikkan harga produk BBM non subsidi per 1 Oktober 2023, mulai dari PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR, serta Vivo Energy Indonesia serentak menaikkan harga BBM non subsidi.

Ketua Umum Bubuhan Driver Gojek Samarinda (BUDGOS) sekaligus Koordinator Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB), Ivan Jaya mengatakan, kenaikan harga BBM berakibat semakin beratnya beban biaya operasional pengemudi ojek online.

Hal ini disebabkan oleh harga BBM yang makin melejit dan berdampak pada stok Pertalite yang terbatas. Sehingga membuat pengemudi ojol harus beralih ke Pertamina.

"Yang menjadi keluhan adalah ketersediaan BBM bersubsidi, mau nggak mau beli Pertamina. Sedangkan ojek online harus tiap hari beli BBM, jadi kami merasa berat karena harus beli yang non-subsidi," tutur Ivan pada Rabu (18/10/2023).

Menurut Ivan, beban operasional yang semakin meningkat seharusnya diselaraskan

dengan penyesuaian tarif oleh aplikasi. Setidaknya membutuhkan ongkos Rp 50.000 untuk operasional. Angka tersebut hanya untuk membeli bahan bakar.

"Untuk saat ini belum ada penyesuaian tarif di aplikasi. Jadi rekan-rekan pengemudi ojek online harus mengeluarkan biaya lebih," ungkapnya

Lebih lanjut Ivan menjelaskan bahwa jumlah orderan yang masuk semakin tidak menentu. Sehingga membuat pengemudi ojek online bisa bekerja lebih dari 8 jam sehari.

"Bahkan, sehari ada yang dapat 3 atau 5, jauh dari pendapatan layak. Makanya jam kerjanya ditambah, bisa lebih dari 8 jam sehari," terang Ivan

Terkait kesejahteraan pekerja, Ivan berharap Pemerintah dapat lebih tegas untuk melindungi hak-hak pengemudi ojek online. Dia juga mengharapkan adanya penyesuaian tarif aplikasi pasca terbitnya SK Gubernur Kalimantan Timur tentang peraturan tarif di aplikasi.

"Harapannya Pemerintah bisa lebih tegas ke pihak aplikasi mengenai peraturan tarif. Karena yang jadi masalah untuk kami adalah kenaikan BBM namun tidak diiringi dengan penyesuaian tarif," pungkasnya

Pewarta : Desy Alvionita

Editor : Nicha Ratnasari



Kunjungan Komisi IV DPRD Kaltim, ke PT KFI

KUNJUNGI LOKASI KEBAKARAN SMELTER NIKEL, KETUA KOMISI IV MINTA SOSIALISASI K3 LEBIH MASIF

SAMARINDA - Pasca insiden kebakaran di PT Kalimantan Ferro Industri (KFI) yang merupakan perusahaan Smelter Nikel di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Komisi IV DPRD Kaltim melakukan tinjauan ke lapangan.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi, menerangkan, insiden kebakaran yang terjadi merupakan bencana yang di luar kendali manusia. Namun, dengan memegang teguh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terutama di area yang tingkat risiko kecelakaan tinggi, insiden dapat dikurangi risikonya.

Terkait insiden kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu, Reza mendorong kepada pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan pembinaan K3 secara masif kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kaltim.

"Khususnya di KFI ini. Karena perusahaan ini juga istilahnya besar sekali dan investasinya juga lumayan untuk Kaltim," ucap Politisi Gerindra ini saat berkunjung ke PT KFI, Rabu (17/10/2023).

Reza bersama Anggota Komisi IV DPRD Kaltim lainnya, yang juga didampingi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, mengatakan PT KFI sebenarnya telah menerapkan K3 di area pekerjaannya. Hanya saja, butuh upaya lebih agar insiden serupa tak terjadi lagi dikemudian hari.

"Saat ini sih KFI terus berupaya untuk meningkatkan K3 yang ada di perusahaan ini dan walaupun ini belum beroperasi masih uji coba, tapi harapan kita ke depannya jangan sampai terulang lagi, maka dari itu nanti akan ada pembinaan," tutupnya. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

Cek Anggota & Pengurus Parpol

Hasil Pencarian :



Nik : 640XXXXXXXXXX
Nama : ZAKARIAS DEMON DATON
Partai Politik : Partai Ummat
Jabatan : ketua
Unit : Kecamatan
Tingkat Wilayah : KECAMATAN
Nama Wilayah : NUNUKAN SELATAN

Tampilkan

Untuk Informasi Lebih Lanjut, Silahkan menghubungi Partai Politik setempat atau kunjungi PPID KPU melalui website ppid.kpu.go.id dan Silahkan mengisi Form Tanggapan Masyarakat Pada Tombol Tanggapan diatas



Foto: Data salah seorang jurnalis media online yang dicatut namanya sebagai pengurus Partai Ummat (Istimewa/Yahya/Media Kaltim)

DPC PARTAI UMMAT NUNUKAN DIDUGA CATUT NAMA JURNALIS DI SAMARINDA JADI PENGURUS KECAMATAN

SAMARINDA - Nama seorang jurnalis media online di Samarinda dicatut jadi pengurus Partai Ummat tingkat kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Jurnalis yang akrab disapa Zaki ini mengaku baru mengetahui namanya dicatut setelah mengecek situs resmi KPU : <https://infopemilu.kpu.go.id/>, pada Rabu (18/10/2023) sore.

Melalui situs itu, tertera namanya dan NIK KTP sebagai Ketua Partai Ummat Kecamatan Nunukan Selatan dengan Nomor KTA 6503091001.D.07887504.

"Saya keberatan atas pencatutan ini. Saya tidak pernah punya hubungan apa pun atau pun berkomunikasi dengan pengurus Partai Ummat di Nunukan. Saya minta Partai Ummat segera cabut nama

saya dari daftar kepengurusan itu," ungkap Zaki.

Zaki berencana melaporkan kasus ini kepada Bawaslu Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

"Saya juga meminta kepada Partai Umat mengklarifikasi. Dari mana mereka dapat NIK KTP saya? Itu bisa saya pidanakan loh, menyalahgunakan identitas saya tanpa izin," tegas dia.

Dalam Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan, para penyalah guna data kependudukan milik orang lain tanpa izin, ancaman pidananya 2 tahun juga denda. Ini berlaku baik secara individu maupun lembaga. (rls)

Pewarta: Yahya Yabo

Editor : Nicha Ratnasari